



**dprp**sp

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
**PROVINSI ACEH**

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2021**

Jl. Ahamad Yani No. 39 Banda  
Aceh, Indonesia



[Dpmptsp.acehprov.go.id](http://Dpmptsp.acehprov.go.id)



[Dpmptsp.aceh@gmail.com](mailto:Dpmptsp.aceh@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

---

**S**yukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh memuat hasil analisis terhadap capaian sasaran strategis dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas atas kinerja DPMPTSP Aceh.

Berkaitan dengan hal tersebut analisis dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja DPMPTSP Aceh agar lebih relevan, efisien, berdampak dan berkelanjutan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, Januari 2022  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

**Marthunis, S.T, D.E.A**

Pembina TK.I

NIP. 19770805 200312 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi .....	2
C. Tugas dan Fungsi .....	3
D. Aspek Strategis .....	3
E. Sistematika Penyajian .....	4
BAB II     PERENCANAAN KINERJA .....	6
A. Perencanaan Strategis Tahun 2017 - 2022 .....	6
B. Perjanjian Kinerja .....	8
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	10
A. Capaian Kinerja DPMPTSP Aceh 2021 .....	10
B. Realisasi Anggaran .....	28
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	31
BAB IV    PENUTUP .....	32
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
2. Daftar Laporan LKPM PMA dan PMDN Tahun 2021	
3. Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2021	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Aceh. Laporan Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh untuk meningkatkan kinerjanya



- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai peraturan perundang-undangan
- d. Penyelenggaraan tugas penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan termasuk lintas kabupaten/kota
- e. Penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai sifat, jenis dan karakteristik perizinan
- f. Pengelolaan system informasi secara efektif, efisien dan mudah diakses
- g. Penanganan pengaduan
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara periodic untuk mengetahui Survey Kepuasan Masyarakat
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan
- j. Penyampaian laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Gubernur secara periodik, dan
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

#### **D. Aspek Strategis**

1. Masih terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam upaya perbaikan pemberian pelayanan bagi investor dan peningkatan realisasi investasi. lintas sektor, perubahan teknologi yang sangat cepat dan dinamis serta jumlah sumber daya manusia yang terbatas, masih banyak masyarakat

yang belum memahami penggunaan aplikasi baru OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Resiko) dan Sicantik Cloud, Belum tersedianya sarana dan prasarana yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan, misalnya untuk kegiatan produksi multimedia inhouse, Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang masih terbatas dan pemerintah kab/kota di Aceh yang belum menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (SKPA) dan Wilayah kab/kota. Meskipun demikian, beberapa kab/kota yang telah menyusun dokumen RUPM tersebut belum sesuai dengan sistematika penulisan RUPM berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kab/Kota.

## **E. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DPMPSTSP Aceh Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut:

### **1) Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **2) Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### 4) Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### 5) Lampiran

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- b. Daftar Laporan LKPM PMDN dan PMA Tahun 2021
- c. Daftar Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan kepadanya.

Visi Pembangunan Aceh Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2017 – 2022 yaitu **“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”**. Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program semua SKPA sehingga dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk memperoleh manfaat dan dampak yang dicita-citakan.

Untuk mewujudkan Visi di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh mengacu pada 2 (dua) misi dari 10 (sepuluh) misi Kepala Daerah 2017-2022 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 (lima) tahun ke depan, adapun Misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani

2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati Mazhab yang lain
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan social yang mudah, berkualitas dan terintegrasi
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan
7. Menyediakan sumber energy listrik yang bersih dan terbarukan
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industry dan industry kreatif yang kompetitif
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sedangkan 2 (dua) misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, yaitu:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani
2. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah telah dirumuskan sejumlah program yang diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, yaitu;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
6. Program Pelayanan Penanaman Modal

## **B. Perjanjian Kinerja**

Diantara sasaran dan indikator kinerja di atas, terdapat sasaran yang strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. IKU ini adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh serta RPJMA Tahun 2017-2022.

Adapun Sasaran Strategis dan IKU Badan Investasi dan Promosi Aceh adalah sebagai berikut:

***Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 DPMPTSP Aceh***

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Meningkatnya Jumlah Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Investor berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA)</li> <li>- Jumlah Nilai investasi berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA)</li> </ul>

		- Rasio Daya Serap Tenaga kerja (PMDN/PMA)
2.	Meningkatnya Nilai Investasi	- Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal yang Prima	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap perizinan

Untuk tahun Anggaran 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh telah menandatangani Perjanjian Kinerja sebagaimana dimuat dalam Lampiran I mengikuti Rencana Strategis 2017-2022. Isinya adalah sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.2 di bawah ini.

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 DPMPTSP Aceh**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya realisasi investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penanaman modal PMA dan PMDN yang melaporkan LKPM</li> <li>- Jumlah nilai realisasi investasi</li> <li>- Rasio daya serap tenaga kerja</li> </ul>	<p>965 perusahaan</p> <p>Rp. 6.650.000.000.000</p> <p>1:75</p>
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan	89,50

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun 2021**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu wujud dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun secara periodik

Pada bab ini akan menguraikan tentang perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022. Pencapaian kinerja pemerintah Aceh dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisis hasil pengukuran pencapaian setiap sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tahun 2021 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dengan realisasinya.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dari BKPM.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Penyusunan Penetapan Kinerja, Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terdiri dari:

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semaksimal baik (Progres Positif) dengan menggunakan rumus:

$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
---------------------------------------------------------------------------------------------------

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian (Progres Negatif), maka digunakan rumus:

$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 3.1** Skala Pengukuran Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis I: Meningkatnya Jumlah Penanam Modal**

Dalam peningkatan Jumlah Penanaman Modal didukung oleh beberapa Program Sebagai Berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Juga didukung oleh Program Pelayanan Penanaman Modal selain itu, juga ikut meningkatkan pencapaian *outcome* Sasaran I ini.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.2 di bawah ini :

**Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama**

No	Indikator kinerja	Capaian 2020	Realisasi 2021			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2021
			Target 2021	Realisasi 2021	% Tingkat Capaian		
1.	Jumlah penanaman modal PMA dan PMDN yang melaporkan	72,17%	965 Perusahaan	1.054 Perusahaan	109,22 %	1.159	
2.	Jumlah nilai realisasi investasi	150,60 %	Rp. 6.650.Triliun	8,46 Triliun	127,20 %	7,300 Triliun	
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	1:17	1:75	1 :7	49,63%	1:80	
	<i>Rata-rata persentase tingkat capaian</i>				<i>95,34%</i>		

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis “*Meningkatnya Jumlah Penanam Modal*” yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dapat diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 95,34 % atau dengan kategori Baik.

Pada tahun 2021 ada beberapa indikator kinerja yang naik dan turun yaitu Jumlah Investor berskala Nasional dan Rasio daya serap tenaga kerja, namun ada juga indikator yang melebihi target yaitu Jumlah nilai realisasi investasi, dengan analisis sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja “*Jumlah Investor berskala Nasional dan Internasional*” ditargetkan 965 perusahaan namun yang dapat direalisasi sebanyak 1.054 (TW III) perusahaan dengan tingkat capaian 109,22% atau kategori Sangat Baik.**

Perhitungan target Jumlah Investor berskala Nasional dan Internasional Pada DPMPSTSP Aceh dihitung berdasarkan jumlah izin yang masuk berdasarkan izin



berusaha Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diterbitkan pada SPIPISE tahun 2021. sebanyak 1.054 perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terdiri dari 51 perusahaan PMA dan 1003 (TW III) perusahaan PMDN.

Penetapan target IKU sebanyak 965 perusahaan/izin PMA dan PMDN pada tahun 2021 dengan terealisasi sebanyak 1.054 perusahaan direkap dengan asumsi perusahaan yang melaporkan LKPM melalui SPIPISE dalam kewenangan Provinsi Aceh, dan belum semua perusahaan yang menyampaikan laporan penanaman modalnya di Aceh, apabila hal ini adanya kesadaran bagi pelaku usaha menyampaikan laporan LKPM sehingga bisa tercapainya target dari IKU lebih tinggi.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan upaya peningkatan pendapatan Aceh bidang perizinan dan non perizinan, telah menerbitkan dokumen izin dan non izin sebanyak 2.686 dokumen melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) dan SICANTIK CLOUD, sedangkan jumlah izin dan non izin yang diterbitkan khusus bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A sebanyak 777 dokumen, perizinan dan non perizinan B sebanyak 443 dokumen, perizinan dan non perizinan C sebanyak 1.466 dokumen. Adapun jenis-jenis perizinan tersebut telah dibagi ke dalam 2 kategori jenis izin, yakni Izin Usaha dan non Izin Usaha

Realisasi investasi merupakan salah-satu Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, untuk mengarah pada perbaikan persepsi orang luar terhadap Aceh. Ini tentu membutuhkan waktu. Karenanya, dukungan semua pihak sangat diharapkan.

Dari tahun 2017 sampai dengan 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh fokus menawarkan 4 sektor prioritas, yakni agro industri, energy, infrastruktur dan pariwisata. Prioritas ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022. Saat ini, berbagai investasi di sektor-sektor tersebut terus dilakukan.

Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal melalui yang di lakukan dengan menyiapkan Investment Project Ready To Offer (IPRO) Kab/Kota Se-Aceh, yang menjadi materi promosi yang akan ditawarkan kepada calon investor melalui forum bisnis, pameran investasi baik di dalam maupun luar negeri yang dilakukan secara online maupun offline serta publikasi pada Platform digital seperti website dan media sosial (Instagram, facebook, twitter, linkedIn), untuk calon investor baru pada tahun 2021 dari target 169 Investor baik dalam dan Luar negeri banyak yang berminat untuk menanamkan modal pada provinsi Aceh dari berbagai sector dengan jumlah 1.126 Investor/perusahaan. Tentunya dalam usaha menggaet lebih banyak calon investor diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik yang di provinsi, kabupaten/kota dan pusat. Perlu adanya pembenahan sumberdaya manusia, menyederhanakan birokrasi dan regulasi serta membuat formulasi ekonomi sehingga target pemerintah dapat dipenuhi. Salah satu prioritas pemerintah Aceh dalam meningkatkan investasi di daerah adalah melalui pengembangan kawasan industry, seperti Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, KEK Arun Lhokseumawe, Pelabuhan Perdagangan Bebas Sabang serta Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo. Aceh saat ini mempunyai empat titik strategis yang telah ditetapkan sebagai organ vital untuk memacu denyut nadi perekonomian Aceh. Ditambah beberapa titik sentra lainnya yang sedang diupayakan yaitu KEK Barat Selatan, KEK Pariwisata di Simeulue dan Pulau Banyak, serta Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional Dataran Tinggi Gayo Alas. Sedangkan terkait dengan KEK Arun Lhokseumawe pemerintah Aceh akan terus melakukan perbaikan iklim investasi supaya menjadi lebih menarik kepada investor seperti permasalahan sewa lahan yang relatif pendek, yaitu selama lima tahun akan ditingkatkan menjadi 30 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terus berupaya menjaring calon-calon investor agar mau menanamkan modalnya di lokasi-lokasi vital tersebut. Berbagai promosi dan program-program kerja sama terus ditingkatkan.

→ **Indikator Kinerja “Rasio Daya Serap Tenaga Kerja” ditargetkan sebanyak 1:75, namun yang dapat direalisasi sebanyak 1:7 dengan tingkat capaian 49,63 % atau kategori Kurang.**

Serapan tenaga kerja pada tahun 2021 dapat dilihat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebanyak 7.496 orang dari 1054 perusahaan PMA dan PMDN yang terdiri dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) diketahui sebanyak 628 pekerja laki-laki dan 7 pekerja perempuan dengan pekerja asing sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 5.275 pekerja laki-laki dan 1.567 pekerja perempuan dan pekerja asing sebanyak 13 orang. Sehingga didapat rasio perbandingan tenaga kerja 1:7 dengan tingkat capaian 49,63 %. Realisasi untuk Rasio Daya Serap Tenaga Kerja masih kurang dari target yang ditetapkan hal ini disebabkan karena masih banyak perusahaan yang belum melaporkan jumlah tenaga kerja dengan jumlah yang sebenarnya serta masih ada perusahaan yang belum melakukan realisasi dari izin yang telah dikeluarkan.

- **Indikator Kinerja “Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)” ditargetkan Rp. 6.650 T mampu direalisasikan 8,45 T dengan tingkat capaian 127,20% atau kategori *Sangat Baik*.**

Realisasi investasi pada tahun 2021 mencapai Rp. 8,45 Triliun atau 127,20%, capaian realisasi ini menurun dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak Rp. 9,11 Triliun. Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pada tahun 2021 untuk Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1,339 Triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan jumlah perusahaan 1.003 yang menyampaikan LKPM. Total tercatat nilai realisasi investasi sebesar Rp. 7,059 Triliun. nilai realisasi investasi sebesar Rp. 8,45 Triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp.6.650 Triliun dengan capaian 127,20% melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMA. Dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 26 orang diantaranya merupakan tenaga kerja asing dengan rasio daya serap tenaga kerja adalah 1:7.

Untuk urusan investasi jangka panjang dibutuhkan waktu dan dukungan dari semua pihak, dimulai dari proses perizinan, survei, studi kelayakan, ketersediaan lahan, dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, kesiapan masyarakat menerima investasi, ketersediaan Sumberdaya manusia dan berbagai faktor lainnya yang saling berkontribusi.

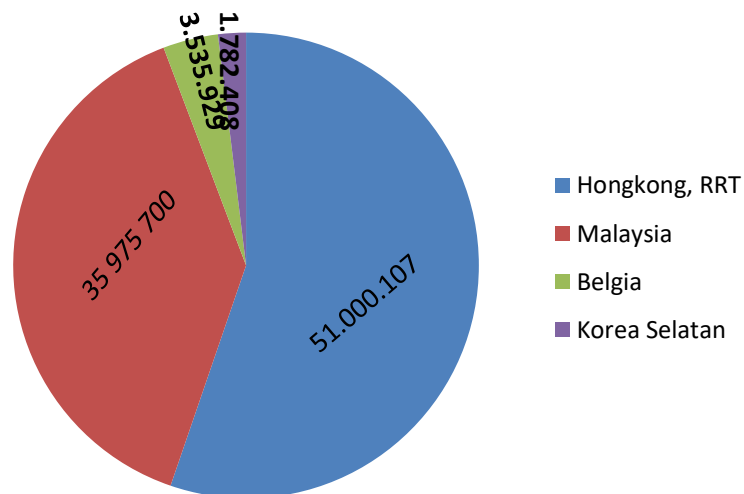
Pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal di daerah, diantaranya penyiapan SDM, penguatan kelembagaan investasi di kabupaten/kota, melakukan deregulasi dalam perizinan investasi, memberikan insentif, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi porsi realisasi investasi di Aceh pada tahun 2021 ini. Dengan jumlah nilai realisasi investasi sebesar Rp. 8,45 Triliun dengan jumlah perusahaan 1.054 yang menyampaikan Laporan.

Capaian realisasi investasi tiap tahun diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh.

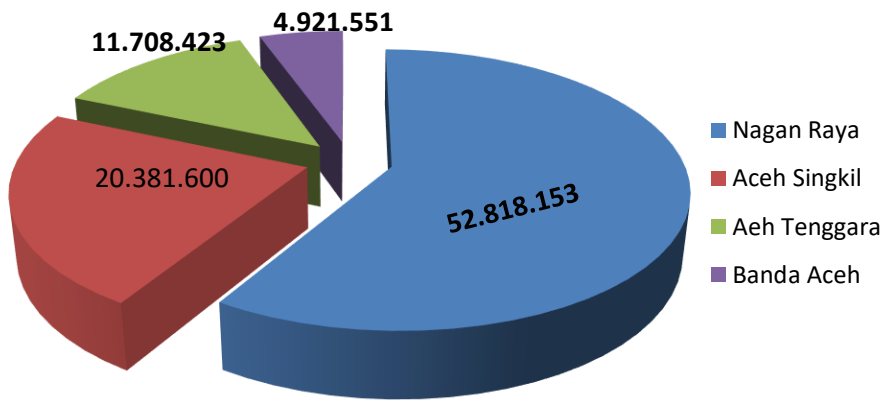
Realisasi investasi PMA 4 besar berdasarkan negara asal investor yaitu; Hongkong, RRT sebesar 51.000.107 US\$, Malaysia sebesar 35.975.700 US\$, Belgia sebesar 3.535.929 US\$, Korea Selatan 1.782.408 US\$.

### REALISASI INVESTASI PMA 4 BESAR BERDASARKAN NEGARA



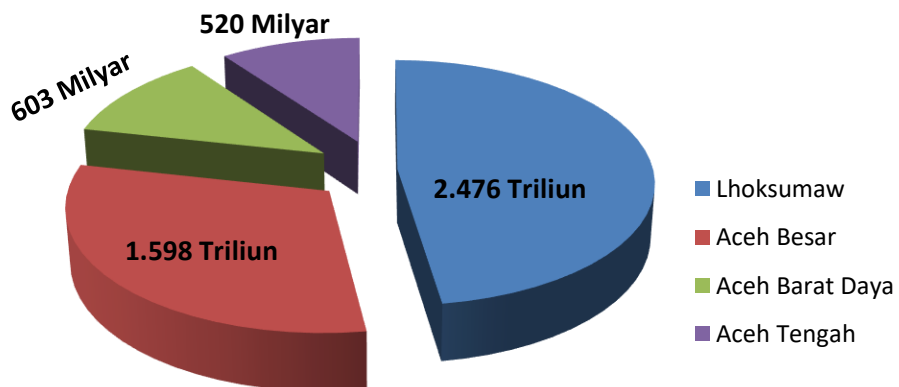
Berdasarkan lokasi, Realisasi PMA Empat besar berturut-turut yaitu di Kabupaten Nagan Raya sebesar 52.818.153 US\$, Aceh Singkil 20.381.600 US\$, Aceh Tenggara 11.708.423 US\$, Banda Aceh 4.921.551 US\$.

### REALISASI INVESTASI PMA BERDASARKAN KAB/KOTA



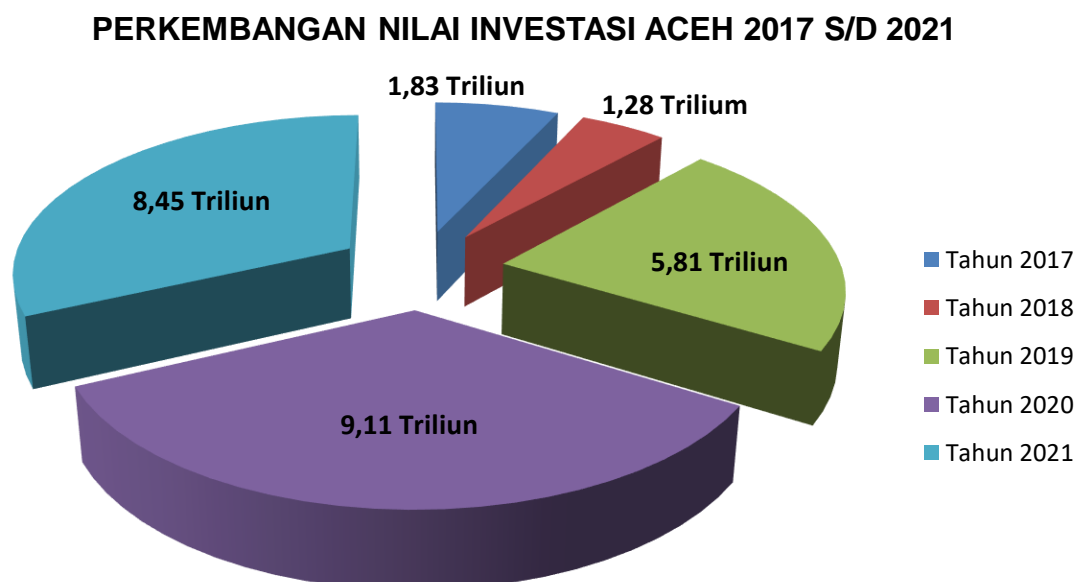
Sedangkan PMDN yaitu Lhokseumawe Rp 2.476.492.369.437 Triliun, Aceh Besar Rp 1.598.940.238.955 Triliun, Kabupaten Aceh Barat Daya Rp. 603.113.302.522 miliar, Kabupaten Aceh Tengah Rp. 520.517.715.873 miliar.

### NILAI INVESTASI PMDN BERDASARKAN KAB/KOTA



Jika ditinjau dari sektor usaha, Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha Empat besar berturut-turut yaitu Listrik, gas dan air 64.768.871 US\$, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan 20.397.508 US\$, Transportasi Gedung dan Telekomunikasi 4.921.551 US\$, industri makanan US\$. Sementara PMDN yaitu, listrik, gas dan air Rp. 3.346.284.917.238 Triliun, konstruksi Rp 1.488.741.436.175 Triliun, industri makanan Rp. 822.665.142.953 miliar dan Industri Kimia dan Fasmasi 329.593.906.908 Miliar. Walaupun capaian kinerja 2021 tidak semua mencapai target, iklim investasi tidak mengalami perubahan ke arah negatif. Seiring dengan itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh terus melakukan pembinaan dan fasilitasi permasalahan penanaman modal melalui tim *taskforce* yang dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak. Beberapa perusahaan yang telah dibina antara lain PT. Anugerah, CV. Alam Hijau Sari, CV. Amanda Jaya, CV. Anugerah Subur dll, dan perusahaan yang sudah di lakukan pengawasan antara lain :PT. Kembang Raya Sakti, PT. Buah Aneuk Aceh Jaya, PT. Ari Pratama Elektrica, PT. Jaya Media Internusa, PT. Kuimini Jaya Expres dll.

Grafik perkembangan nilai realisasi investasi Aceh kurun waktu lima tahun dari 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Tahun	Target Renstra	Realisasi LKPM
2017	3.498.013.000.000	1.830.049.482.995
2018	5.000.000.000.000	1.280.560.724.083
2019	5.500.000.000.000	5.812.090.744.152
2020	6.050.000.000.000	9.111.016.573.779
2021	6.650.000.000.000	8.459.113.406.107

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami trend naik melebihi dari target RPJMA 2017 – 2022 yang telah di tetapkan dalam Renstra, hal ini ini menunjukkan berkembang kegiatan penanaman modal di Aceh dengan katagori baik.

Beberapa beberapa hal mengalami peningkatan realisasi LKPM disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam melaporkan LKPM secara tepat waktu dan berkesinambungan.
- b. Perusahaan sudah memiliki kode akses sehingga dapat menyampaikan
- c. LKPM melalui SPIPISE.
- d. Meningkatnya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi baik dengan Kabupaten/Kota maupun dengan perusahaan yang berada dilokasi masing-masing.
- e. Tim *taskforce* sudah melakukan pembinaan/kunjungan lapangan bagi perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM.

Disamping upaya yang telah dilakukan diatas, dalam mendorong peningkatan investasi masih terdapat kendala antara lain masih kurangnya jumlah tenaga evaluasi LKPM, kapasitas dan kompetensi tenaga evaluator belum memadai serta kendala operasional lainnya. Dalam rangka mendorong



peningkatan realisasi investasi asing dan domestik, Pemerintah Aceh akan melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan memperkuat kelembagaan DPMPTSP sebagai unit pelayanan investasi. Demikian pula pengembangan agroindustri, infrastruktur pelabuhan dan jalan tembus, serta pengembangan pariwisata menjadi prioritas penanganan dan ini semua memerlukan dukungan segenap lapisan masyarakat.

### **Solusi Pengendalian Penanaman Modal:**

- a. Perlu adanya tambahan tenaga evaluasi LKPM untuk melakukan verifikasi atas LKPM yang diterima dengan mengoptimalkan SDM yang ada.
- b. Perlu sistem elektronik input data LKPM yang mudah dipakai petugas untuk mempercepat dan memperkecil kesalahan *database*.
- c. Perlu adanya tambahan kendaraan yang sesuai yang bisa masuk ke lokasi proyek terutama untuk proyek perkebunan dan pertambangan.
- d. Menegur perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM melalui Surat Teguran dan perlu adanya sanksi sesuai ketentuan.
- e. Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat, dan setiap perusahaan yang berinvestasi di Aceh agar membuka kantor di Aceh.
- f. Perlu diberi pembinaan kepada perusahaan agar menyampaikan kewajibannya untuk mengirimkan LKPM secara berkesinambungan dan benar sesuai ketentuan.
- g. Kuantitas dan kualitas tim verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal belum memadai.

- h. Perlu digalakkan investasi yang padat karya (lebih banyak menggunakan tenaga kerja), sehingga lebih banyak lapangan kerja baru yang tersedia untuk menurunkan tingkat pengangguran.
- i. Kualitas pemantauan perlu ditingkatkan dengan pembinaan kepada aparaturnya tenaga pemantauan realisasi penanaman modal provinsi dan Kabupaten/Kota.
- j. Diharapkan perusahaan dapat melaporkan permasalahan yang dihadapi dan realisasi importasi mesin, sehingga menjadi bahan dasar dalam melakukan pengawasan.
- k. Pembinaan kepada perusahaan harus terus dilakukan, dan diharapkan perusahaan dapat mengisi sendiri LKPM melalui SPIPSE.
- l. Rapat koordinasi harus dihadiri oleh pengambil kebijakan, baik dari instansi terkait maupun dari perusahaan agar pengambilan kebijakan dapat segera diambil untuk menjadi solusi bagi masalah yang sedang dihadapi.
- m. Perlu peningkatan kerjasama, konsolidasi dengan pemerintah pusat dan daerah mengenai data dan informasi realisasi investasi yang disampaikan perusahaan.
- n. Perlu meningkatkan sosialisasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal dan instansi teknis Kabupaten/Kota.
- o. Tim Taskforce perlu turun ke lapangan untuk mengetahui persis permasalahan yang dihadapi perusahaan dan masyarakat setempat.
- p. Publikasi tentang LKPM dapat dilakukan setiap triwulan dengan memasukkan jumlah perusahaan yang belum menyampaikan LKPM dan yang tidak aktif.
- q. Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi kembali kepada pemerintah Kab/Kota (pertemuan IPF, rapat-rapat teknis, workshop) untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang merupakan dokumen perencanaan jangka

panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (SKPA) dan Wilayah kab/kota, sekaligus menyusun sesuai dengan sistematika penulisan RUPM berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kab/Kota.

- r. Perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan yang bersifat project-project clear and clean dan siap ditawarkan kepada calon investor dalam bentuk IPRO/Prospektus Investasi, baik di tingkat Provinsi, maupun Kab/Kota melalui kegiatan pendampingan, workshop, FGD, dengan melibatkan tenaga ahli (Bank Indonesia, Akademisi, BKPM, dll).
- s. Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi kembali kepada pemerintah Kab/Kota (pertemuan IPF, rapat-rapat teknis, workshop) untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (SKPA) dan Wilayah kab/kota, sekaligus menyusun sesuai dengan sistematika penulisan RUPM berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Kab/Kota.

Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan realisasi investasi asing dan domestik dengan menyederhanakan prosedur perizinan dan memperkuat kelembagaan DPMPSTSP. Demikian pula pengembangan agroindustri, infrastruktur pelabuhan dan jalan tembus, serta pengembangan pariwisata menjadi prioritas penanganan yang memerlukan dukungan segenap lapisan masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat

mendukung program prioritas pemerintah pusat melalui sektor listrik, infrastruktur, dan kemaritiman. Kegiatan-kegiatan penanaman modal diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh.

**Sasaran Strategis II: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan**

Didukung oleh Program Pelayanan Penanaman Modal dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.3 di bawah ini.

**Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Tingkat Capaian	Kategori
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan	89,50	87,39 %	97,64%	Baik
Rata-rata tingkat capaian				97,64%	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan*” yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, dapat diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 97,64 % atau dengan kategori **Baik**.

Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pengukuran 1 (satu) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

→ **Indikator Kinerja “*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan*” yang ditargetkan 89,50 dapat direalisasi sebanyak: 87,39 capaian 97,64% atau kategori Baik.**

Merupakan salah satu indikator penting yang digunakan oleh DPMPTSP Aceh dalam menunjukkan peran dan fungsinya menuju tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan pelayanan publik dalam bidang berusaha di Aceh, berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui evaluasi kinerja pelayanan perizinan yang diberikan semua unsur terkait di DPMPTSP Aceh. Nilai pelayanan publik dapat dilihat pada nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan secara berkala melalui 2 (dua) pendekatan, Pertama : Pendekatan penilaian berdasarkan perspektif pemberi layanan di DPMPTSP Aceh, Kedua : Pendekatan penilaian perspektif publik, penerima pelayanan yaitu masyarakat dan para pelaku usaha di Aceh. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survey, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyusun instrument survei
- b. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel
- c. Menentukan responden
- d. Melaksanakan survei
- e. Mengolah hasil survei

f. Menyajikan dan melaporkan hasil survey

Berdasarkan kuesioner dirumuskan 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

- a. Persyaratan pelayanan
- b. Prosedur pelayanan
- c. Waktu penyelesaian
- d. Biaya/tarif
- e. Produk layanan
- f. Kompetensi pelaksana
- g. Perilaku pelaksana
- h. Maklumat pelayanan
- i. Penanganan pengaduan

**Tabel 3.4** Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (TKM) 9 Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1	Persyaratan	3,28	82,12
2	Prosedur	3,27	81,65
3	Waktu Pelayanan	3,20	79,96
4	Biaya/tariff	3,72	92,98
5	Produk layanan	3,37	84,27
6	Kompetensi pelaksana	3,45	86,24
7	Perilaku pelaksana	3,50	87,55
8	Maklumat pelayanan	3,79	94,76
9	Penanganan pengaduan	3,84	95,97

Tabel diatas menunjukkan unsur pelayanan yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi unsur pelayanan penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai NRR=3,84 yang dikategorikan A (Nilai Interval Konversi IKM = 95,97)

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 9 unsur pelayanan perizinan dan non perizinan tersebut diperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Tahap I : 87,28 dan pada Tahap II : 87,39. maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu **pelayanan B dengan kategori BAIK**. Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan angka adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Kategorisasi Mutu Pelayanan**

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00-1,75	25,00-43,75k	D	TIDAK BAIK
1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK
2,51-3,25	62,51-81,25	B	BAIK
<b>3,26-4,00</b>	<b>81,26-100,00</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

### **B. Realisasi Anggaran**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh melaksanakan 4 (empat) program utama pada Tahun Anggaran 2021 dengan didukung 1 (satu) program, berbagai kegiatan. Ini merupakan bagian dari pencapaian target Rencana Strategis 2017-2022. Beberapa kegiatan tidak dianggarkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan bidang penanaman modal pada tahun kelima RPJM Aceh 2017-2022. Pandemi covid 19 terjadi penghambatan beberapa kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh pergeseran anggaran membuat banyak kegiatan tidak dilaksanakan dan berupaya menggunakan anggaran seefektif dan efisien mungkin. Pagu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh pada tahun 2021 setelah terjadinya pergeseran anggaran adalah sebesar Rp. 51.609.324.768 Sedangkan realisasinya per 31 Desember 2021 adalah Rp.

45.273.117.162 atau 87,72% dari pagu anggaran. Kinerja ini dinilai oleh Tim Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) APBA sebagai prestasi yang bagus (kategori Hijau). Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Pada tabel 3.6 menunjukkan realisasi anggaran belanja DPMPTSP Aceh Tahun 2021.

**Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Belanja DPMPTSP Aceh Tahun 2021**

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi	%
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)
<b>BELANJA BIDANG PM</b>		<b>51.609.324.768</b>	<b>45.280.119.182</b>	<b>87.72</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	43.449.329.438	38.741.794.213	89.18
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	965.818.443	658.759.330	68.21
3	Program Promosi Penanaman Modal	2.797.664.855	2.036.783.856	72.80
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	2.720.957.871	2.304.849.978	84.71
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.406.574.150	1.265.563.395	89.97
6	Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	268.980.011	265.366.410	98.66
	<b>TOTAL</b>	<b>51.609.324.768</b>	<b>45.273.117.182</b>	<b>87.72</b>

Berdasarkan komposisi Anggaran Belanja DPMPTSP Aceh Tahun 2021 yang berjumlah Rp. 51.609.324.768 yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 43.449.329.438, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp. 965.818.443, Program Promosi Penanaman Modal Rp.



2.797.664.855, Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 2.720.957.871, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp. 1.406.574.150, Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal Rp. 268.980.011

Perkembangan dan realisasi APBA serta persentase daya serap anggaran setiap tahun tidak sama, namun rata-rata pencapaian realisasi anggaran selama 6 (enam) tahun mencapai 85,03% secara rinci sebagaimana tertera dalam tabel 3.7 di bawah ini:

**Tabel 3.7 Jumlah dan Realisasi APBA dalam kurun waktu 2016-2021**

No.	Tahun	APBA		%
		Jumlah	Realisasi	
1.	2016	16.246.441.008	15.402.262.613	94,80
2.	2017	30.754.308.494	27.926.479.293	90,81
3.	2018	34.429.973.088	27.979.730.159	81,27
4.	2019	58.229.007.168	53.889.450.693	92,55
5.	2020	39.977.687.024	26.284.987.559	65,75
6.	2021	51.609.324.768	45.273.117.182	87,72
Rata – rata pencapaian realisasi				85,03

Pada akhir tahun 2019 terjadi kenaikan anggaran dikarenakan adanya pembangunan gedung baru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dan banyak juga terealisasi anggaran, sehingga kegiatan hampir terlaksana semua. Namun secara keseluruhan tingkat capaian penyerapan anggaran di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja DPMPTSP Aceh tetap efisien dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal, sejalan dengan perbaikan dalam sistem perencanaan, sistem

penganggaran dan sistem pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang berbasis pada kinerja.

## **B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dari pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh berhasil mencapai tingkat efisiensi dalam pencapaian nilai realisasi investasi tahun 2021 melalui Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dapat melebihi dari target RPJMA 127,20 % dari target yang ditetapkan dan penyerapan anggaran 89,97%. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintah yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sehingga terjadinya efisiensi anggaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2020), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir renstra. Secara umum, Nampak bahwa kinerja DPMPTSP Aceh pada tahun 2021 adalah baik, karena adanya terjadi kenaikan dan 1 indikator memenuhi kriteria sangat baik, yaitu jumlah nilai realisasi investasi yang melebihi target sebanyak 127,20% dan jumlah rasio tenaga kerja mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya 1:17 menjadi 1:7. IKM juga diperoleh nilai yang sangat baik yaitu berkisar diantara 87,39-95,97, maka kinerja unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DPMPTSP Aceh untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pengembangan investasi di Aceh. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan, khususnya dalam renstra dan Renja Tahun 2021, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan

alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh antara lain:

1. Harmonisasi regulasi perizinan dan nonperizinan
2. Peningkatan koordinasi antar lembaga dan lintas sektoral
3. Mendorong pengembangan kawasan – kawasan industry baru
4. Promosi penanaman modal yang difokuskan pada detailed planed dengan berbagai metode
5. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal

Namun demikian beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja DPMPTSP Aceh ke depan. Pertama walaupun IKU telah mencapai target yang baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. peran DPMPTSP Aceh diperlukan untuk memastikan fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Bagi instansi di lingkungan DPMPTSP Aceh, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Marthunis, S.T, D.E.A**  
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Ir. Nova Iriansyah, MT**  
Jabatan : **Gubernur Aceh**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh,

2021

Pihak Kedua,  
✓ Gubernur Aceh, ✓

**Ir. Nova Iriansyah, MT**

Pihak Pertama,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Marthunis, S.T, D.E.A**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Jumlah penanaman modal PMA dan PMDN yang melaporkan LKPM - Jumlah nilai realisasi investasi - Rasio daya serap tenaga kerja	965 Perusahaan  6.650.000.000.000 1:75
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan	89,50

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	44.548.129.438	
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	965.818.443	
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	2.797.664.855	
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	2.720.957.871	
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	1.406.574.150	
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	268.980.011	

Banda Aceh,

2021

✓ Gubernur Aceh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Ir. Nova Iriansyah, M.T

Marthunis, S.T, D.E.A

IAN - SEP 2021

PMA

PROYEK - LOKASI

Kab/Kota	Proyek	Tamb Investasi	%	TKI-L	TKI-P	TKA	Total TK
Nagan Raya	8	52.818.153	55,09%	262	1	8	271
Aceh Singkil	6	20.381.600	21,26%	117	-	-	117
Aceh Tenggara	2	11.708.423	12,21%	49	1	-	50
Banda Aceh	9	4.921.551	5,13%	8	-	-	8
Aceh Tamiang	2	1.490.981	1,56%	149	-	-	149
Aceh Tengah	3	1.043.745	1,09%	37	4	5	46
Gayo Lues	6	691.781	0,72%	-	-	-	-
Bireuen	2	633.345	0,66%	-	-	-	-
Bener Meriah	2	623.288	0,65%	3	1	1	5
Langsa	2	475.691	0,50%	-	-	-	-
Pidie	4	374.625	0,39%	-	-	-	-
Sabang	4	368.334	0,38%	-	-	-	-
Simeulue	6	162.760	0,17%	-	-	-	-
Aceh Besar	5	84.090	0,09%	2	-	-	2
Aceh Utara	4	82.749	0,09%	-	-	-	-
Aceh Selatan	4	7.464	0,01%	1	-	-	1
Aceh Timur	2	725	0,00%	-	-	-	-
Aceh Jaya	2	342	0,00%	-	-	-	-
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>73</b>	<b>95.869.646</b>	<b>100,00%</b>	<b>628</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>649</b>

9. Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor (Jan-Sep 2021) adalah :

<b>JAN - SEP 2021</b>
<b>PMA</b>
<b>PROYEK - SEKTOR</b>

23 Sektor	Proyek	Tamb Investasi	%	TKI-L	TKI-P	TKA	Total TK
Listrik, Gas dan Air	30	64.768.871	67,56%	52	3	8	63
Tanaman Pangan, Perkebunan, da	7	20.397.508	21,28%	528	-	-	528
Transportasi, Gudang dan Telekom	5	4.921.551	5,13%	-	-	-	-
Industri Makanan	9	3.178.306	3,32%	7	-	-	7
Pertambangan	5	943.262	0,98%	1	-	-	1
Perikanan	4	638.885	0,67%	-	-	-	-
Industri Kimia Dan Farmasi	1	626.780	0,65%	37	4	5	46
Hotel dan Restoran	4	382.861	0,40%	-	-	-	-
Jasa Lainnya	5	11.622	0,01%	1	-	-	1
Industri Lainnya	1	-	0,00%	-	-	-	-
Perdagangan dan Reparasi	2	-	0,00%	2	-	1	3
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>73</b>	<b>95.869.646</b>	<b>100,00%</b>	<b>628</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>649</b>

10. Realisasi Investasi PMA berdasarkan Negara Asal (Jan-Sep 2021) adalah

<b>JAN - SEP 2021</b>
<b>PMA</b>
<b>PROYEK - NEGARA ASAL</b>

Negara Asal	Proyek	Tamb Investasi	%	TKI-L	TKI-P	TKA	Total TK
Hongkong, RRT	10	51.000.107	53,20%	-	1	8	9
Malaysia	17	35.975.700	37,53%	57	1	-	58
Belgia	4	3.535.929	3,69%	528	-	-	528
Korea Selatan	8	1.782.408	1,86%	3	1	-	4
Singapura	7	1.040.253	1,09%	-	-	-	-
Belanda	3	823.162	0,86%	-	-	-	-
R.R. Tiongkok	10	648.064	0,68%	37	4	5	46
Ceko	1	367.395	0,38%	-	-	-	-
Thailand	2	360.497	0,38%	-	-	-	-
Cayman Islands	2	309.042	0,32%	-	-	-	-
Swedia	1	14.918	0,02%	-	-	-	-
Amerika Serikat	1	10.000	0,01%	-	-	-	-
Spanyol	1	938	0,00%	-	-	-	-
Brazil	1	684	0,00%	-	-	-	-
Perancis	2	548	0,00%	2	-	-	2
Inggris	1	-	0,00%	-	-	-	-
Rusia	1	-	0,00%	1	-	-	1
Swiss	1	-	0,00%	-	-	1	1
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>73</b>	<b>95.869.646</b>	<b>100,00%</b>	<b>628</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>649</b>



11. Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Lokasi (Jan-Sep 2021) adalah :

<b>JAN - SEP 2021</b>
<b>PMDN</b>
<b>PROYEK - LOKASI</b>

NO	23 Sektor	Proyek	Tambah Inv	TKI-L	TKI-P	TKA	Total TK
1	Lhokseumawe	169	2.476.492.369.437	326	88	1	415
2	Aceh Besar	535	1.598.940.278.955	1.313	213	1	1.527
3	Aceh Barat Daya	30	603.113.302.522	108	4	-	112
4	Aceh Tengah	39	520.517.715.873	42	31	-	73
5	Aceh Utara	270	479.650.494.075	285	18	-	303
6	Banda Aceh	561	312.402.166.654	493	194	-	687
7	Aceh Tamiang	106	219.854.733.951	86	17	-	103
8	Pidie	75	202.268.404.962	19	4	-	23
9	Aceh Selatan	40	151.997.140.835	135	11	-	146
10	Nagan Raya	40	125.294.660.179	78	23	-	101
11	Aceh Barat	79	83.281.724.604	661	115	-	776
12	Langsa	49	69.362.042.755	429	223	-	652
13	Aceh Timur	60	55.774.658.428	264	33	-	297
14	Bireuen	76	41.038.523.766	694	525	1	1.220
15	Aceh Singkil	21	40.272.548.455	11	9	-	20
16	Gayo Lues	14	33.037.770.000	79	8	2	89
17	Aceh Jaya	23	15.751.078.619	107	5	-	112
18	Pidie Jaya	33	13.091.720.910	55	16	-	71
19	Subulussalam	39	9.895.700.000	36	14	-	50
20	Bener Meriah	11	4.362.740.000	22	8	-	30
21	Sabang	19	2.700.800.000	26	8	-	34
22	Aceh Tenggara	14	289.000.000	4	-	-	4
23	Simeulue	8	27.000.000	2	-	-	2
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>2311</b>	<b>7.059.416.574.980</b>	<b>5.275</b>	<b>1.567</b>	<b>5</b>	<b>6.847</b>

12. Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Sektor (Jan-Sep 2021) adalah :

<b>JAN - SEP 2021</b>
<b>PMDN</b>
<b>PROYEK - SEKTOR</b>

NO	23 Sektor	Proyek	Tambah Inv	TKI-L	TKI-P	TKA	Total TK
1	Listrik, Gas dan Air	95	3.346.284.917.238	185	21	1	207
2	Konstruksi	547	1.488.741.436.175	599	58	-	657
3	Industri Makanan	55	822.665.142.953	590	40	-	630
4	Industri Kimia Dan Farmasi	16	329.593.906.908	96	4	-	100
5	Perdagangan dan Reparasi	1012	242.046.392.588	1.980	487	-	2.467
6	Jasa Lainnya	224	209.778.777.062	723	806	1	1.530
7	Transportasi, Gudang dan Telel	70	160.617.306.173	192	15	-	207
8	Industri Mineral Non Logam	15	147.781.304.917	78	12	-	90
9	Hotel dan Restoran	84	101.796.504.834	152	60	-	212
10	Pertambangan	22	76.640.121.359	281	22	-	303
11	Tanaman Pangan, Perkebunan,	82	70.360.957.642	195	22	-	217
12	Kehutanan	4	33.000.000.000	79	8	2	89
13	Industri Kayu	10	13.646.200.000	20	1	-	21
14	Perumahan, Kawasan Industri	23	8.423.400.000	24	3	-	27
15	Industri Lainnya	12	4.751.107.131	27	3	-	30
16	Perikanan	9	1.791.100.000	49	2	1	52
17	Industri Kertas dan Percetakan	19	1.498.000.000	5	3	-	8
18	Industri Tekstil	6	-	-	-	-	-
19	Industri Mesin, Elektronik, Inst	3	-	-	-	-	-
20	Industri Logam Dasar, Barang L	3	-	-	-	-	-
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>2311</b>	<b>7.059.416.574.980</b>	<b>5.275</b>	<b>1.567</b>	<b>5</b>	<b>6.847</b>



e-skm



SCAN ME



# LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PERIODE I

(Januari-Juni) Tahun 2021 pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh



# **LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PERIODE I (JANUARI-JUNI)**

TAHUN 2021

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**

**DPMPTSP ACEH**

**SEMESTER I TAHUN 2021**

**NILAI IKM**

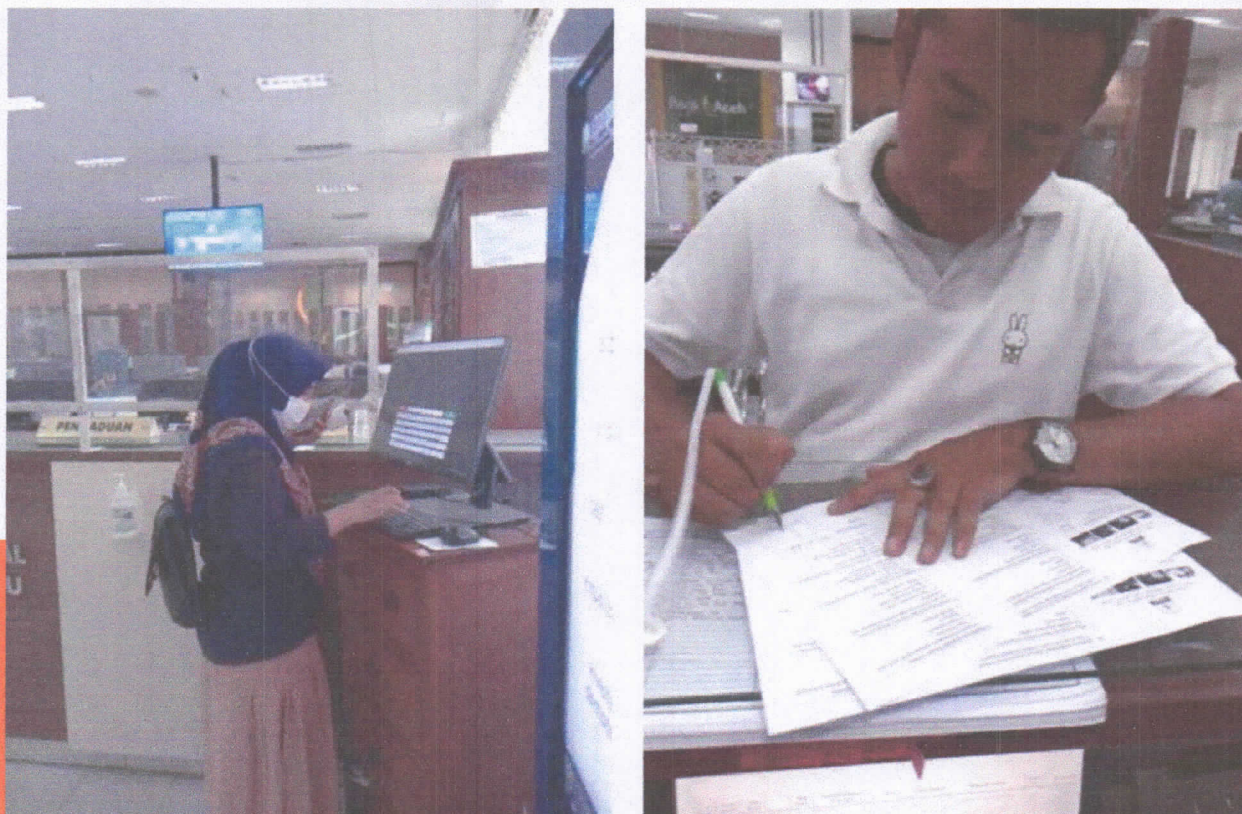
**87,28**

**NAMA LAYANAN: PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**RESPONDEN**

JUMLAH : 267 ORANG  
JENIS KELAMIN : L : 146 ORANG  
P : 121 ORANG  
PENDIDIKAN : SD : 2 ORANG  
SMP : 4 ORANG  
SMA : 47 ORANG  
DI, D2, D3 : 121 ORANG  
S1 : 82 ORANG  
S2 : 11 ORANG

PERIODE SURVEI : JANUARI S.D JUNI 2021



- Proses pengisian SKM oleh responden secara elektronik dan non elektronik

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Aceh melalui nilai IKM, atribut layanan yang dianggap penting oleh masyarakat untuk perbaikan pelayanan.

### 1.3 METODE

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara periodik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat dalam jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap triwulan (tiga bulanan), satu semester (enam bulanan), atau satu tahun (12 bulan) sekali. Survei ini merupakan pengukuran pendapat publik dalam satu semester, periode enam bulan pertama, Januari-Juni 2021.

5. Nurul Afriani, SE/Pelaksana pada DPMPTSP Aceh
6. Rahmi, S.Kom/Pelaksana pada DPMPTSP Aceh
7. Irma Safitri, SKM/Pelaksana pada DPMPTSP Aceh
8. Rizka Handayani/Pelaksana pada DPMPTSP Aceh
9. Zulfahmi, A.Md/Pelaksana pada DPMPTSP Aceh

## 1.5 JADWAL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan di area *front office* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh secara periodik yaitu sebanyak 2 kali dalam setahun. SKM yang dilaporkan ini adalah SKM Periode Januari-Juni 2021. Jadwal pelaksanaan SKM ini sebagaimana dalam table di bawah ini.

**Tabel 2**  
**Jadwal Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Menurut kegiatan Periode 1 (Januari-Juni) Tahun 2021**

No	Kegiatan	Bulan Pelaksanaan					
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni
1	Menyusun instrument survey, menentukan besaran dan teknik penarikan sampel, menentukan responden & pelaksanaan survei	v					
2	Pelaksanaan survei		v				
3	Pelaksanaan survei			v			
4	Pelaksanaan survei				v		
5	Pelaksanaan survei					v	
6	Pelaksanaan survei						v

**Tabel 3**  
**Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	146	54,68
2	Perempuan	121	45,32
<b>TOTAL</b>		<b>267</b>	<b>100</b>

**Tabel 4**  
**Jumlah Responden Menurut Kelompok Umur**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	16-28 tahun	124	46,44
2	29-40 tahun	91	34,08
3	41-52 tahun	41	15,36
4	53-64 tahun	10	3,75
5	65-75 tahun	1	0,37
<b>TOTAL</b>		<b>267</b>	<b>100</b>

**Tabel 5**  
**Jumlah Responden Menurut Jenjang Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	SD ke bawah	2	0,75
2	SLTP	4	1,50
3	SLTA	47	17,60
4	D1,D2,D3	121	45,32
5	S1	82	30,71
6	S2 ke atas	11	4,12
<b>TOTAL</b>		<b>267</b>	<b>100</b>

**Tabel 6**  
**Jumlah Responden Menurut Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	PNS/TNI/Polr	31	11,61
2	Pegawai Swasta	44	16,48
3	Wiraswasta/Usahawan	90	33,71
4	Pelajar/Mahasiswa	45	16,85
5	Lainnya	57	21,35
<b>TOTAL</b>		<b>267</b>	<b>100</b>

Berdasarkan Tabel 3, 4, 5 dan 6 di atas dapat diketahui karakteristik responden sebagai berikut:

1. Sebaran responden menurut jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki mencapai 146 orang atau sebesar 54,68%
2. Responden dengan umur terbanyak yaitu pada kisaran umur 16-28 tahun, mencapai 46,44%
3. Pendidikan terakhir yang ditempuh responden paling banyak tingkat diploma, mencapai 45,32%
4. Pekerjaan utama responden paling banyak wiraswasta/ usahawan dengan persentase sebesar 33,71%

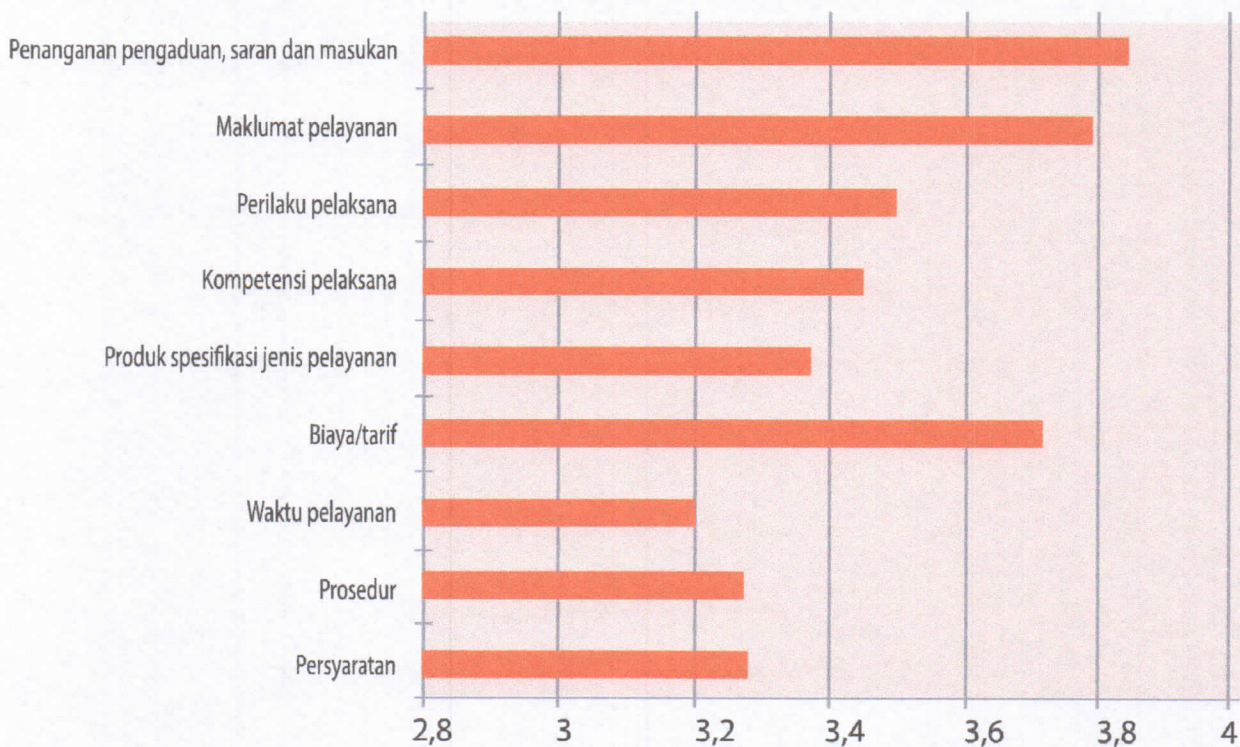


**Tabel 7**  
**Analisis Hasil Survei Berdasarkan Kriteria Responden**

Kriteria Responden	Persyaratan	Sistem, mekanisme dan prosedur	Waktu penyelesaian	Biaya/tarif	Produk spesifikasi jenis pelayanan	Kompetensi pelaksana	Perilaku pelaksana	Maklumat pelayanan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	IKM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total	82,12	81,65	79,96	92,98	84,27	86,24	87,55	94,76	95,97	87,28
	B	B	B	A	B	B	B	A	A	B
muda	80,89	79,29	79,64	94,29	83,75	84,82	86,43	93,93	96,07	86,57
	B	B	B	A	B	B	B	A	A	B
dewasa	82,84	83,33	79,41	91,42	83,33	86,76	87,75	95,34	96,32	87,39
	B	B	B	A	B	B	B	A	A	B
tua	86,00	88,00	84,00	92,00	91,00	92,00	93,00	97,00	94,00	90,78
	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A
laki-laki	82,36	82,71	78,94	91,61	84,59	87,50	89,04	95,38	94,86	87,44
	B	B	B	A	B	B	A	A	A	B
perempuan	81,82	80,37	81,20	94,63	83,88	84,71	85,74	94,01	97,31	87,08
	B	B	B	A	B	B	B	A	A	B
dasar	83,49	82,55	80,19	88,68	86,32	90,09	91,04	97,17	97,64	88,57
	B	B	B	A	B	A	A	A	A	A
diploma	82,44	82,23	82,44	95,66	84,09	86,36	86,98	95,66	97,11	88,11
	B	B	B	A	B	B	B	A	A	B
sarjana	80,91	80,38	76,61	91,94	83,33	83,87	86,29	92,20	93,55	85,45
	B	B	B	A	B	B	B	A	A	B
PNS/TNI/POLRI	80,65	82,26	79,03	91,13	83,87	83,87	87,90	91,13	95,16	86,11
	B	B	B	A	B	B	B	A	A	B
Pegawai Swasta	81,25	80,68	76,70	92,61	82,39	81,25	82,95	93,18	95,45	85,16
	B	B	B	A	B	B	B	A	A	B
Wiraswasta/Wirusaha	83,61	83,33	81,11	91,39	85,56	88,61	90,28	96,67	95,00	88,40
	B	B	B	A	B	A	A	A	A	A
Pelajar/Mahasiswa	80,56	82,22	81,67	95,00	85,56	88,89	88,89	96,67	97,22	88,52
	B	B	B	A	B	A	A	A	A	A
Lainnya	82,46	78,95	79,82	95,18	82,89	85,53	85,53	93,42	97,37	86,79
	B	B	B	A	B	B	B	A	A	B

masyarakat merasa puas terhadap tata cara penanganan pengaduan dan tindak lanjut yang dilakukan DPMPTSP Aceh. Pelayanan yang diberikan dinilai sangat baik dengan mutu pelayanan yang dikategorikan A (Nilai Interval Konversi IKM=95,97).

**Grafik 1**  
**IKM Per Unsur Layanan**



Unsur pelayanan penanganan pengaduan, saran, dan masukan, juga mendapat NRR tertinggi Periode I (Januari-Juni) Tahun 2020 yaitu 3,88 dengan IKM 97,02. Perbandingan capaian kinerja hasil survei tahun 2021 dengan tahun 2020 pada Periode I (Januari-Juni) dapat dilihat dalam Tabel 9 sebagai berikut.



**dpmrpsp**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu  
PROVINSI ACEH

# LAPORAN SURVEI

## KEPUASAN MASYARAKAT PERIODE II (JULI - NOVEMBER) TAHUN 2021

e-skm



SCAN ME



PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

**LAPORAN SURVEI KEPUASAN  
MASYARAKAT PERIODE II  
(JULI - NOVEMBER)**

TAHUN 2021

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)  
DPMPTSP ACEH  
SEMESTER II TAHUN 2021**

**NILAI IKM**

**87,39**

**NAMA LAYANAN: PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**RESPONDEN**

JUMLAH : 270 ORANG  
JENIS KELAMIN : L : 111 ORANG  
P : 159 ORANG  
PENDIDIKAN : SD : 2 ORANG  
SLTP : 3 ORANG  
SLTA : 90 ORANG  
DI, D2, D3 : 106 ORANG  
S1 : 62 ORANG  
S2 : 7 ORANG  
PERIODE SURVEI : JULI S.D NOPEMBER 2021